

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.22A.12.21.6049 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
- b. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Reviu Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);


3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANJARMASIN ,


LEONARD DUMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS

OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.01.02.22A.12.21.6049 TAHUN 2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024

REVIU RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor HK.02.02.109.05.20.1728 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2020-2024. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Balai Besar POM di Banjarmasin perlu melakukan reviu terhadap Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

B. TUJUAN

Tujuan Reviu Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024 adalah sebagai acuan:

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan Balai Besar POM di Banjarmasin;
2. Dalam penyusunan dokumen evaluasi paruh waktu dan akhir periode pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024;

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 adalah:

1. Reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi; dan
2. Reviu indikator kinerja dan target.

BAB II
HASIL REVIU RENCANA STRATEGI
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN

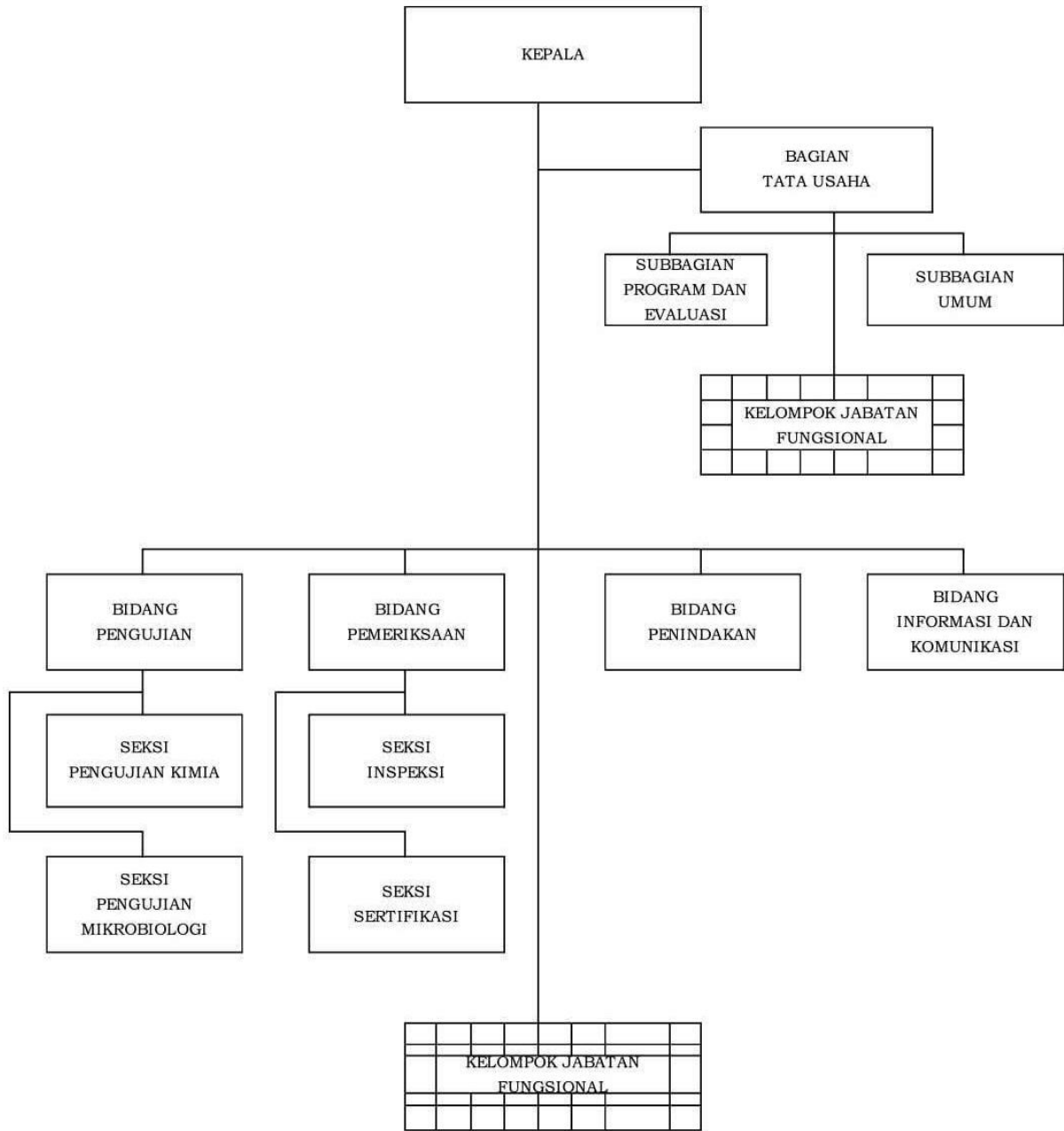
A. Reviu Terhadap Bab I Pendahuluan

1. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan dampak terhadap susunan organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin. Adapun perubahan Organisasi dan Tata Kerja dimaksud sebagai berikut :

1.1. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Struktur Organisasi Balai Besar POM terdiri atas :

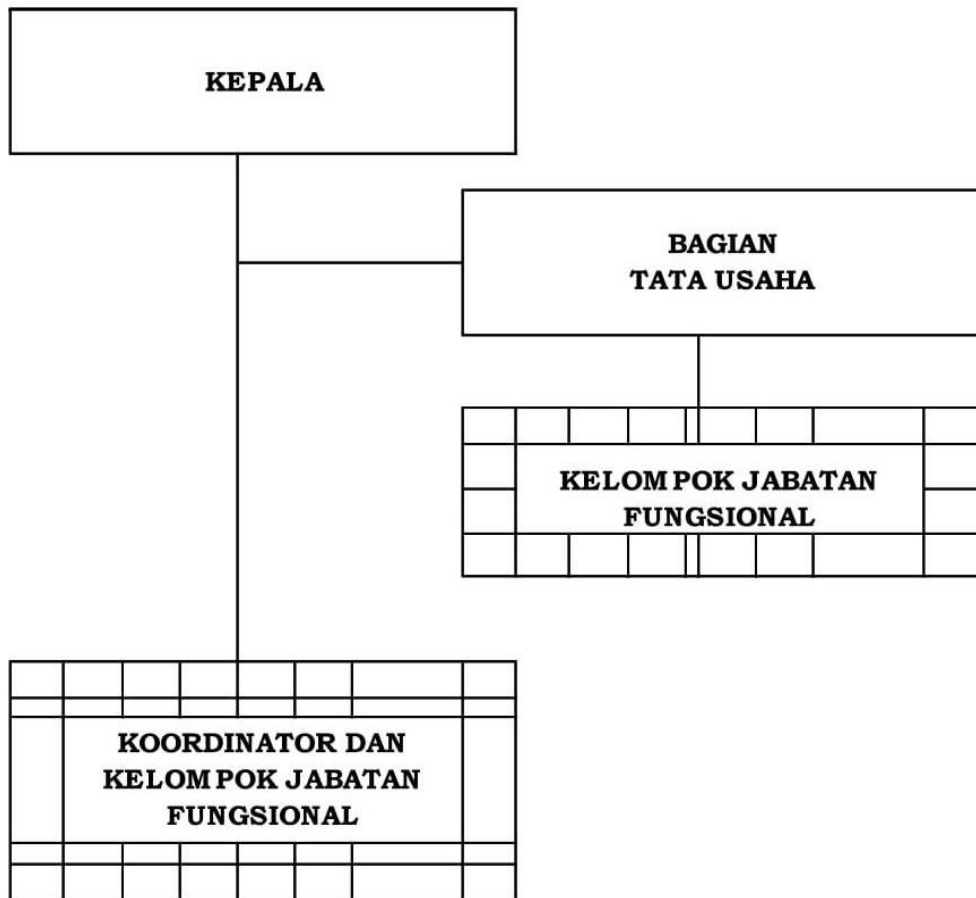
1. Kepala;
2. Bidang Pengujian;
 - a. Seksi Pengujian Kimia;
 - b. Seksi Pengujian Mikrobiologi;
3. Bidang Pemeriksaan;
 - a. Seksi Inspeksi;
 - b. Seksi Sertifikasi;
4. Bidang Penindakan;
5. Bidang Informasi dan Komunikasi;
6. Bagian Tata Usaha;
 - a. Subbagian Program dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin Mengacu Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018

1.2. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Struktur Organisasi Balai Besar POM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin Mengacu Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pada struktur organisasi yang baru terdapat penyederhanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional,

efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional, ditetapkan Koordinator dan Subkoordinator yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan kelompok substansi masing-masing.

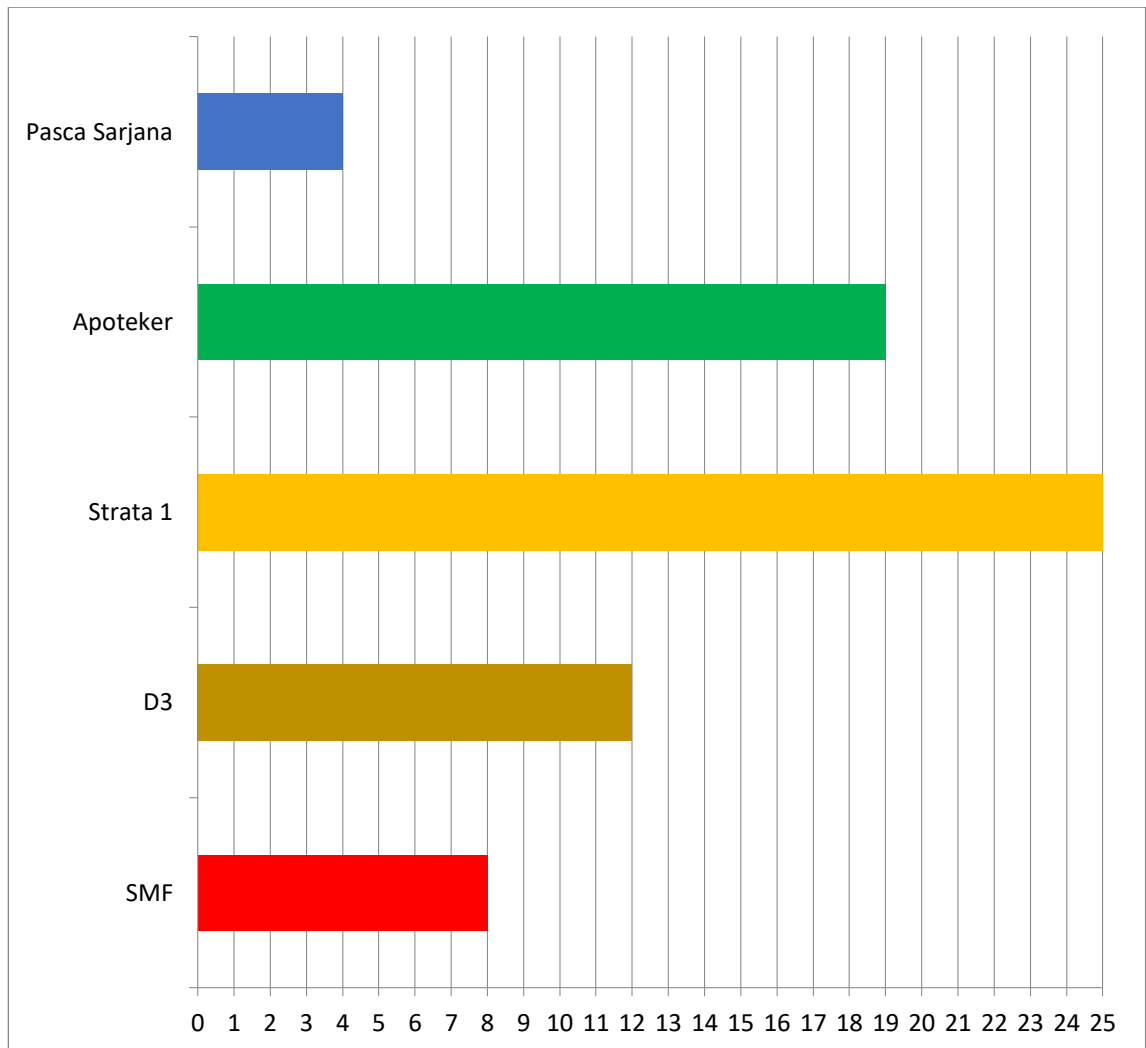
Pejabat Eselon III atau Kepala Bidang berubah menjadi Koordinator Kelompok Substansi, sedangkan Pejabat Eselon IV atau Kepala Seksi / Kepala Sub Bagian berubah menjadi Subkoordinator Subkelompok Substansi.

2. Perubahan Kebutuhan SDM berdasarkan ABK

Pada Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024, BBPOM di Banjarmasin telah memetakan kebutuhan SDM berdasarkan Analisis Beban Kerja di mana untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara memadai pada saat itu diperlukan pegawai sebanyak 74 orang (termasuk untuk Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu) atau khusus untuk BBPOM di Banjarmasin masih diperlukan 51 pegawai. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi, perlu dilakukan reviu terhadap kebutuhan SDM Balai Besar POM di Banjarmasin. Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2021 sejumlah 68 Orang dengan proporsi 66,18 % perempuan dan 33,82 % laki-laki. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas Pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Ditinjau dari analisa bebas kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Balai Besar POM di Banjarmasin memerlukan SDM sebanyak 141 orang. Selain jumlah, kompetensi SDM yang memadai juga sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarmasin.

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2021



Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi Apoteker masih mendominasi. Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai organisasi yang scientific based seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak daripada saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Banjarmasin harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang dinamis.

3. Capaian Kinerja 2020

Hasil pelaksanaan tahun pertama Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 tersaji dalam Tabel Capaian Sasaran Strategis dan Indikator

Tabel 1.
Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis I: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	78,05	96,6
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	81,54	104,54
Persentase Obat yang Berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	94	68,77	73,16
Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan	85	79,46	93,48
Sasaran Strategis II: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin			
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	68	78,36	115,24
Sasaran Strategis III: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	86	96,35	112,03
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	72	76,11	105,71
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	88,5	89,18	100,77

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis IV: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin			
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	81,64	93,84
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	53,52	97,31
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	99,81	121,72
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	36,59	182,93
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	59,96	109,02
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11	3,69	118,65
Sasaran Strategis V: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin			
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	83,73	88,80	106,06
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	100
Jumlah desa pangan aman	4	4	100
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100
Sasaran Strategis VI: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	97,27	108,08
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,41	107,12
Sasaran Strategis VII: Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di BBPOM di Banjarmasin			
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	81	89,69	110,73

IKU	2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)
Sasaran Strategis VIII: Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif			
Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	74,08	87,15
Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	76,14	95,18
Sasaran Strategis IX: Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal			
Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	80,16	106,88
Sasaran Strategis X: Menguatnya laboratorium serta data dan informasi pengawasan obat dan makanan			
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	67,2	88,42
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	1,82	120,53
Sasaran Strategis XI: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel			
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	90,96	97,81
Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	100	111,11

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum capaian kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin melebihi 100 persen, artinya target yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

Merujuk pada tabel 1, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan beberapa hal antara lain, adanya perubahan kebijakan dari eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin selain adanya pandemic Covid-19. Berdasarkan realisasi dan capaian kinerja di atas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja 2021-2024.

Hal tersebut dilakukan guna mendorong peningkatan kinerja dan upaya inovasi dalam rangka perlindungan masyarakat dan mendukung daya saing produk Obat dan Makanan.

Selain kinerja yang d sajikan dalam matriks di atas, Balai Besar POM di Banjarmasin juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, antara lain:

- Pengawasan distribusi dan pengelolaan vaksin dalam rangka menjamin keamanan dan mutu vaksin di Kalimantan Selatan
- Pengawasan dan pengelolaan distribusi obat yang digunakan dalam penatalaksanaan Covid-19 di Kalimantan Selatan
- Persiapan laboratorium pengujian menggunakan PCR yang dapat digunakan dalam pengujian Covid-19
- Pendampingan terhadap pelaku usaha baru Obat Tradisional yang digunakan dalam penanganan Covid-19

4. Potensi dan Permasalahan Baru yang Muncul

Dalam renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024, Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan identifikasi dan permasalahan untuk menganalisa permasalahan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam renstra Balai Besar POM di Banjarmasin yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

- 1) Peran Balai Besar POM di Banjarmasin sangat dibutuhkan dalam rangka distribusi vaksin covid-19 untuk mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu vaksin terutama dalam pengawasan Cara Distribusi Obat yang Baik. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), Badan POM berperan penting dalam pemberian persetujuan pelaksanaan uji klinik vaksin Covid-19, pemberian persetujuan pemasukan jalur khusus bahan baku atau produk yang diperlukan untuk pengembangan dan penggunaan vaksin Covid-19; pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

- 2) Peran Balai Besar POM di Banjarmasin dibutuhkan dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan COVID-19. Munculnya banyak alternatif bahan alam kekayaan hayati Kalimantan Selatan yang dianggap dapat mengobati/memberikan daya tahan tubuh terhadap Covid-19, memberikan dampak pada meningkatnya animo pelaku usaha sebagai produsen Obat Tradisional.

Permasalahan:

- 1) Koordinasi dengan peneliti/*stakeholder* terkait dalam pengembangan obat dan vaksin Covid-19 yang belum optimal.
 - 2) Meningkatnya produksi dan peredaran obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 tidak diimbangi dengan data dukung memadai yang dapat digunakan registrasi sehingga perlu peran Balai Besar POM di Banjarmasin dalam intensifikasi pembinaan dan pendampingan dalam rangka pemenuhan persyaratan *premarket* obat-obatan tersebut.
- b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 “Pengendalian Penyakit dan Imunisasi”**

Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

2) **Area ke-5 “Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan”**

khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study/PASS*); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.

3) **Area ke-6 “Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)”**

khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta

implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan medis habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

- 4) **Area ke-8 “Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat”** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.



Gambar 4. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Permasalahan:

- 1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmakovigilans masih relatif rendah.
- 2) Adanya segmentasi kewenangan dan urusan dalam upaya kemandirian industri farmasi dalam negeri menjadi terhambat.
- 3) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, di sisi lain untuk laboratorium di luar Badan POM masih belum memadai dari sisi jumlah dan kompetensinya.
- 4) Masih terbatasnya kapasitas Badan POM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan.

Potensi:

- 1) Perizinan berbasis risiko merupakan sistem perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko tersebut dibagi menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Selain itu, beberapa faktor lain juga

dipertimbangkan seperti peringkat skala kegiatan usaha dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah dan peraturan Kepala Badan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem perizinan Obat dan Makanan yang lebih mudah dan cepat tentu sangat membantu perbaikan ekonomi negara.

- 2) Pelaku usaha memperoleh kemudahan akses dalam proses perizinan Obat dan Makanan dikarenakan sistem yang dibangun terintegrasi dalam satu sistem OSS-RBA
- 3) Pemanfaatan teknologi dalam sistem OSS-RBA dapat memberikan data yang valid dan mampu telusur yang dapat digunakan sebagai data awal pengawasan *pre* maupun *postmarket* terkait Obat dan Makanan

Permasalahan

- 1) Adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan
- 2) Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha
- 3) Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online
- 4) Kapasitas Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Banjarmasin masih terbatas dibanding tuntutan dalam pemenuhan pendampingan dalam rangka perubahan-perubahan yang terjadi dalam perizinan Obat dan Makanan terhadap pelaku usaha maupun *stakeholder*

B. Reviu Terhadap Bab II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis

1. **Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin** , karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banjarmasin serta amanah Badan POM yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 2.
Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin
Tahun 2020-2024

Visi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024	<ol style="list-style-type: none">1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan

	<p>yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.4. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. <p>Catatan :</p> <p>Tujuan tersebut mengacu pada tujuan Badan POM dalam rencana strategis Badan POM tahun 2020-2024. Tercapainya tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 diukur dengan indikator kinerja tujuan yang juga merupakan indikator kinerja sasaran strategis, sehingga target indikator kinerja sasaran strategis dijadikan target indikator kinerja tujuan. Oleh karena itu, kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Jika dalam satu tujuan terdapat lebih dari satu indikator kinerja tujuan, yang dihitung sebagai keberhasilan tujuan adalah rata-rata dari keseluruhan capaian indikator tujuan pada tujuan tersebut.</p>
--	---

2. Terdapat perubahan terhadap Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 yaitu penambahan indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan serta untuk mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut:

Tabel 3. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi

Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya SDM BBPOM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN BPOM	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM internal	1. Penguatan pengelolaan kompetensi SDM dan analisa kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai 2. Peningkatan sistem pengawasan dan manajemen kinerja pegawai
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja	1. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik 2. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	1. Penguatan KIE terkait keamanan Obat dan Makanan kepada masyarakat 2. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan	1. Komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung,

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>	<p>lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>BBPOM di Banjarmasin 2. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin</p>		<p>GMP dan GDP untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha 3. Pendampingan UMKM pangan olahan dalam rangka memperoleh Nomor Izin Edar</p>	<p>media cetak, media elektronik dan media sosial 2. Fungsionalisasi tokoh/organisasi masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat 3. Intensifikasi pembinaan pelaku usaha 4. Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi UMKM</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry Obat dan Makanan serta</p>	<p>1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin</p>	<p>1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat 3. Persentase Obat yang aman bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM stakeholder dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan 3. Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan 4. Peningkatan presentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat 5. Peningkatan kerjasama/koordinasi</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM stakeholder dari pemerintah daerah terkait 2. Pemberdayaan masyarakat/ komunitas di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan 3. Penyelesaian pembangunan gedung dan laboratorium 4. Peningkatan ketersediaan serta optimalisasi alat laboratorium dan sarana prasarana lainnya 5. Peningkatan kompetensi SDM penguji</p>
		<p>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin</p>	<p>1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu 2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<p>kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>3. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin</p>	<p>3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</p> <p>1. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang</p>	<p>dengan stakeholder dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>6. Penguatan pengawasan pre-market dan post-market secara komprehensif dan berbasis risiko 7. Optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh BBPOM di Banjarmasin 8. Intensifikasi advokasi kepada stakeholder 9. Optimalisasi implementasi tindak lanjut Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440-05/9989/SJ tanggal 27 September</p>

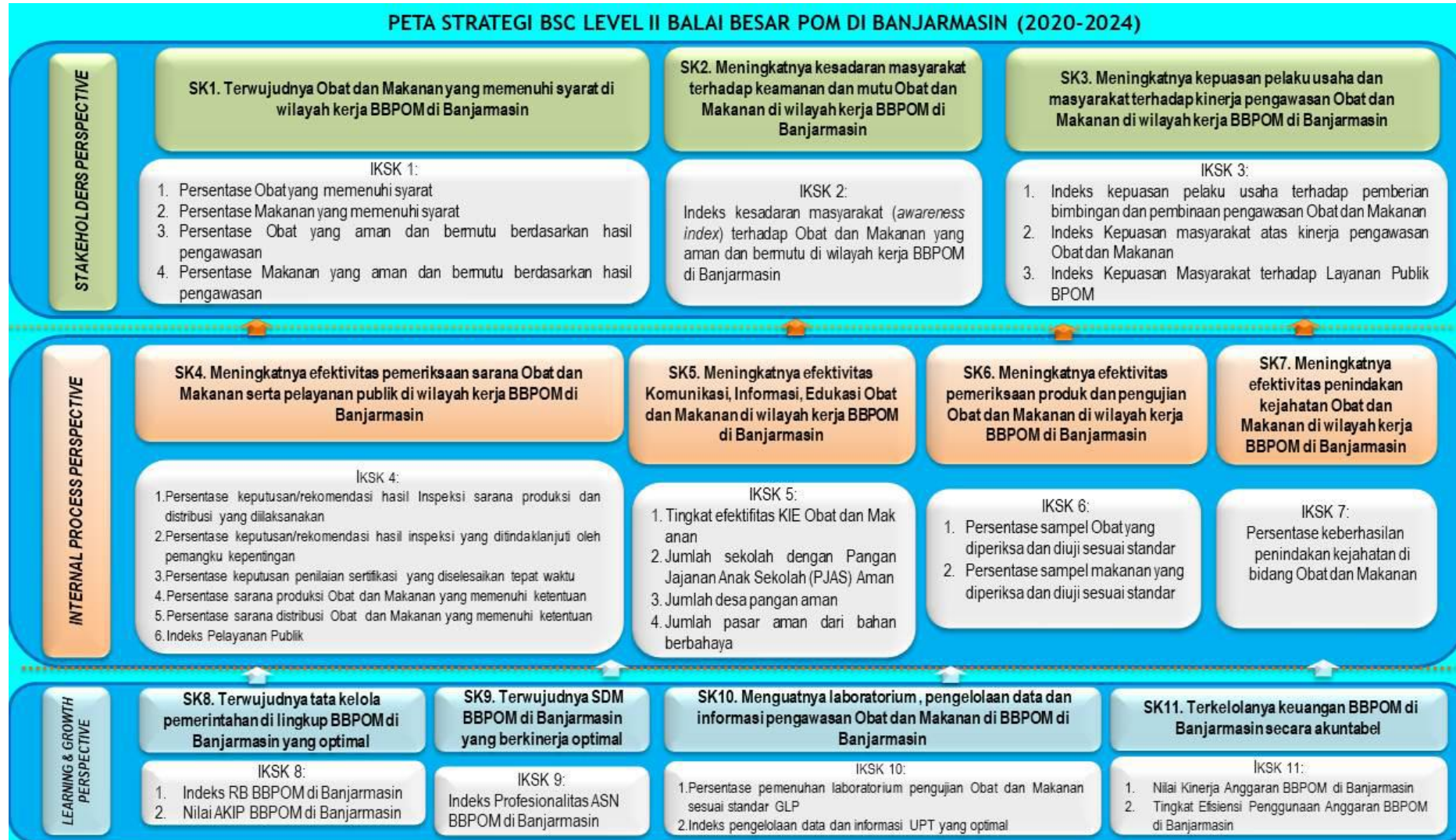
MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			diselesaikan tepat waktu 5. Persentase sarana produk si obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 6. Persentase sarana distribu si obat dan makanan yang memenuhi ketentuan 7. Indeks Pelayanan Publik 8. Indeks kepuasan masyara kat terhadap Layanan Publik		2019 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah 10. Peningkatan koordinasi antara BBPOM di Banjarmasin dan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat & Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. 2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat & Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui kerjasama dalam kerangka <i>Criminal Justice System</i>	Peningkatan koordinasi antara BBPOM di Banjarmasin dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan negeri, Kepolisian baik di Tingkat Kepolisian Daerah maupun Kepolisian tingkat Resort dan Sektor serta dengan Pengadilan Negeri dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana atau <i>Criminal Justice System (CJS)</i>
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1. Indeks RB BBPOM di Banjarmasin 2. Indeks profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin 3. Indeks pengelolaan data	Peningkatan pelayanan public dalam rangka tercapainya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di BBPOM di	1. Mendorong peningkatan dan penerapan inovasi pelayanan public 2. Peningkatan kualitas pelayanan public

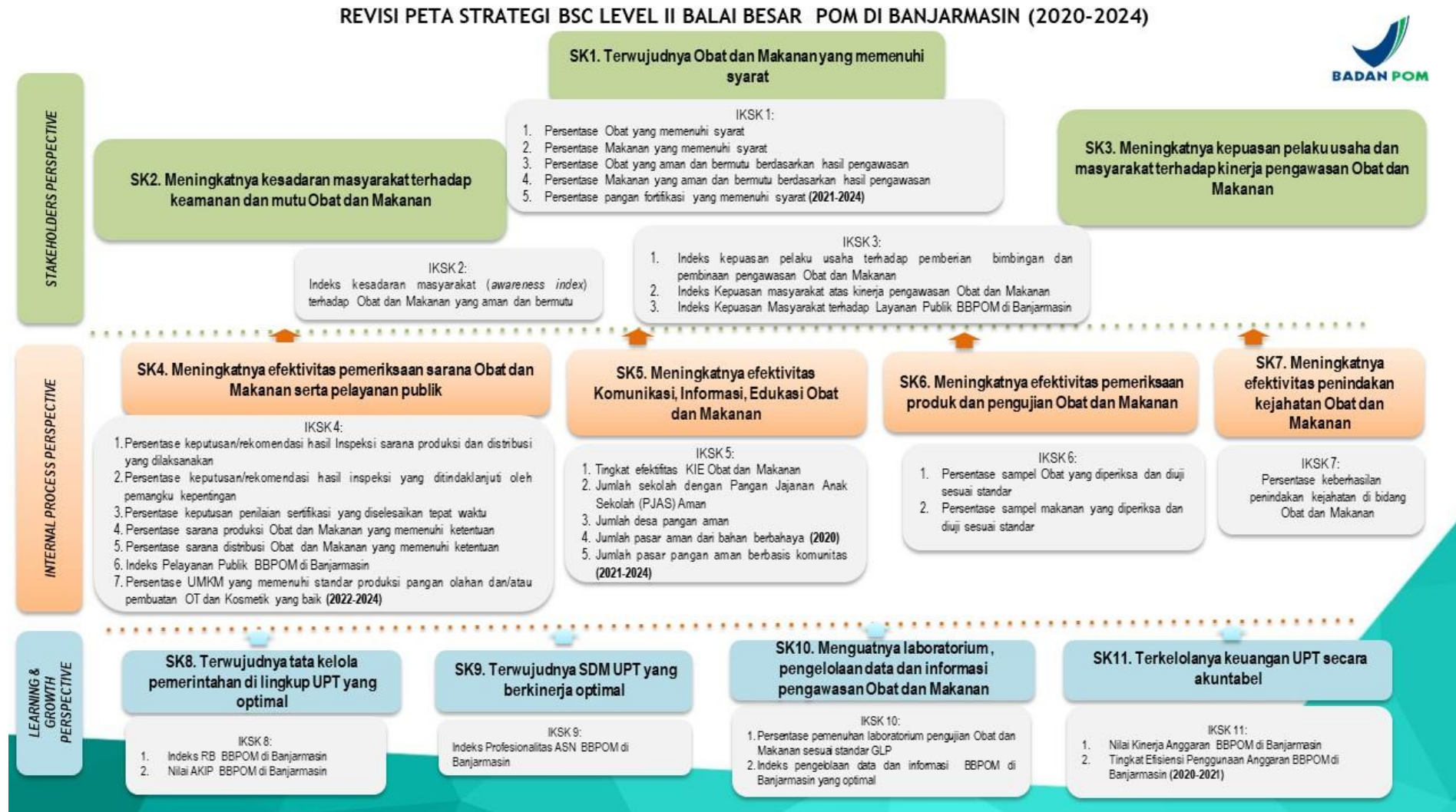
MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
prima di bidang Obat dan Makanan.	memberikan pelayanan publik yang prima.		dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	Banjarmasin	3. Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi 4. Penguatan pengelolaan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik
		2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP		
		3. Terkelolanya keuangan BBPOM di Banjarmasin secara akuntabel	1. Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin 2. Nilai Kinerja anggaran BBPOM di Banjarmasin 3. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran BBPOM di Banjarmasin		

3. Sasaran Strategis dan IKU Badan POM

Tidak ada perubahan peta strategi BPOM yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Badan POM, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU Balai Besar POM di Banjarmasin yang akan dijelaskan lebih rinci dalam poin D mengenai Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan. Adapun sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024



Gambar 6. Revisi Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

C. Reviu Terhadap Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan Badan POM

Dalam hal arah kebijakan Badan POM, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan Badan POM, sebagai berikut:

- a. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan tidak hanya dilakukan terhadap pelaku usaha namun juga terhadap **lembaga riset**.
- b. Mengakomodir adanya kebijakan pemerintah tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Badan POM harus lebih selektif dalam memilah pelaku usaha yang perlu dibina atau pelaku usaha yang merupakan sindikat kejahatan yang memiliki niat jahat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, perlu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan **dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Perubahan tata urut Arah Kebijakan Badan POM sesuai arahan Kepala Badan POM dalam RDP RKA-K/L Pagu Indikatif Badan POM Tahun Anggaran 2022.

Secara rinci, perubahan Arah Kebijakan Badan POM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.a. Perubahan Arah Kebijakan Badan POM 2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	3. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Arah Kebijakan Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam hal arah kebijakan Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan memperhatikan adanya perubahan lingkungan strategis terkini dan perubahan arah kebijakan Badan POM, maka dilakukan beberapa perubahan pada Arah Kebijakan Balai Besar POM di Banjarmasin, sebagai berikut:

- a. Pendampingan UMKM dalam rangka memperoleh nomor izin edar tidak hanya dilakukan terhadap UMKM pangan olahan, namun juga terhadap UMKM **Kosmetik dan Obat Tradisional**
- b. Mengakomodir adanya penyesuaian arah kebijakan Badan POM terkait penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yaitu perubahan paradigma bidang penindakan dimana proses penyidikan menjadi upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan tepat menyasar pada pelaku yang memiliki niat jahat. Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi “Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui kerjasama dalam kerangka *Criminal Justice System* (CJS) dan **upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan**”.
- c. Dengan diperolehnya predikat Wilayah Bebas Korupsi oleh BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2021, maka perlu mengembangkan arah kebijakan untuk dapat memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini dituangkan dalam arah kebijakan menjadi “Peningkatan indeks RB dan tercapainya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** di Balai Besar POM di Banjarmasin”

Tabel 4.b. Perubahan Arah Kebijakan Balai Besar POM di Banjarmasin
2020-2024

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM internal	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM internal
2. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM stakeholder dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	2. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM stakeholder dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
3. Peningkatan pelayanan publik dan pemberian KIE terkait keamanan Obat dan Makanan	3. Peningkatan pelayanan publik dan pemberian KIE terkait keamanan Obat dan Makanan
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan	4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan
5. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacture Practice dan Good Distribution Practice untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha	5. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan Good Manufacture Practice dan Good Distribution Practice untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha
6. Pendampingan UMKM pangan olahan dalam rangka memperoleh nomor izin edar	6. Pendampingan UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional dalam rangka memperoleh nomor izin edar
7. Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan	7. Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
8. Peningkatan presentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	8. Peningkatan presentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Arah Kebijakan (Semula)	Arah Kebijakan (Menjadi)
9. Peningkatan kerjasama/koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan	9. Peningkatan kerjasama/koordinasi dengan stakeholder dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
10. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	10. Peningkatan koordinasi rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
11. Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui kerjasama dalam kerangka Criminal Justice System (CJS)	11. Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan melalui kerjasama dalam kerangka Criminal Justice System (CJS) dan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
12. Peningkatan indeks RB dan tercapainya predikat Wilayah Bebas Korupsi di BBPOM di Banjarmasin	12. Peningkatan indeks RB dan tercapainya predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di BBPOM di Banjarmasin

3. Strategi Badan POM

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi BPOM, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan *re-grouping* strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi Badan POM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan Badan POM.

Secara rinci, perubahan Strategi BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 5. Perubahan Strategi BPOM 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Penguatan pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber , intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

4. Terkait Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin, tidak terdapat perubahan dari yang tercantum dalam Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024. Kedua kerangka tersebut masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan kelembagaan dan regulasi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

D. Reviu Terhadap Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin yang digambarkan dalam **Peta Strategi Level II BBPOM di Banjarmasin, tidak terdapat perubahan** baik pada level sasaran strategis maupun indikator, **namun dilakukan penyesuaian target kinerja** dengan

menggunakan baseline baru berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Dari 30 (tiga puluh) IKU Balai Besar POM di Banjarmasin, secara umum target tetap dan meningkat. Namun demikian **terdapat target indikator yang turun**, antara lain:

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat
- b. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- c. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin
- e. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
- f. Jumlah desa pangan aman
- g. Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
- h. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
- i. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
- j. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

Secara rinci perubahan target indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKU) Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 6. Perubahan Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,60	86,6	90	92,3	78,05	82	83	84	85
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80,00	82	84	86	81,54	80	81	82	83
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	85,00	94	95	95	68,77	70	72	74	76
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86,00	87	88	89	79,46	85,5	86	86,5	86,7
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-	-	92	93	94	95

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	71,00	74	78	81	78,36	81	84	86	89
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,50	89	90.5	92	96,35	91.1	92.3	93.4	94.6
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75,00	77	80	83	76,11	78.33	80.56	82.78	85.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	88,5	90,55	91	91.5	92	89,18	90	91	91,5	92

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95	81,64	82	83	85	87
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75	53,52	60	62	65	70
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	88	86	88	90	99,81	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	35	22	23	24	36,59	45	50	55	60
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65	59,96	63	66	68	71

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	3,69	3.91	4.12	4.34	4.55
	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	-	-	-	-	-	-	-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73	85,41	78	81	85	88,80	90	91,8	93,6	95,5
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20 (16*)	40	60	80	100	16	40	60	80	100
	Jumlah desa pangan aman	6 (4*)	12	19	25	32	4	12	19	25	32
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,00	91	91	92	97,27	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,00	91	91	92	96,41	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83,00	85	88	90	89,69	90	92	94	96
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	85	89,00	93	94	95	74,08	80.8	83.3	85.8	88.3
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	80	84,00	89	91	92	76,14	78.1	80.1	82.1	84.1
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	75	77,00	80	82	85	80,16	81	82	83	84

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Semula)					Realisasi (2020)	Target Kinerja (Menjadi)			
		2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	77,00	78	79	80	67,2	73	78	83	88
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	1,82	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	93	94,00	95	96	97	90,96	92.5	93.1	94.3	95.5
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)	Efisien (100%)	Efisien (92%)	-	-	-

*) Karena adanya refocussing anggaran, Target IK Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2020 dikurangi dari 20 sekolah menjadi 16 dan Target IK Jumlah desa pangan aman tahun 2020 dikurangi dari 6 desa menjadi 4 desa.

2. Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Badan POM melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan serta Program Dukungan Manajemen yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai kegiatan di masing-masing program tersebut. Adanya perubahan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana dijelaskan dalam gambar 1 dan 2, berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur kegiatan Badan POM serta munculnya kegiatan baru yang berdampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran Badan POM. Adapun perubahan kegiatan dimaksud tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perubahan Nomenklatur Kegiatan Badan POM Terhadap Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM

No	Kegiatan OTK Lama (Semula)	Kegiatan OTK Baru (Menjadi)
1	-	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2	Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
3	Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	Pengawasan Produksi Pangan Olahan
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
5	-	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber
6	Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan	-
7	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM
8	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM	Pengelolaan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Adanya program dan kegiatan baru tersebut juga memberikan dampak terhadap proses perencanaan dan penganggaran BBPOM di Banjarmasin.

3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Badan POM secara umum masih sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan POM dikaitkan dengan tren besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas setiap tahunnya, sehingga deviasi antara kerangka pendanaan dan realisasi alokasi anggaran tidak jauh berbeda. Anggaran tersebut dirasa masih cukup untuk pemenuhan target kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024.

E. Reviu Terhadap Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan

Reviu dan penyesuaian terhadap Lampiran I, yang memuat sasaran strategis dan IKU Badan POM serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2020, pergeseran tugas dan fungsi antar Unit Kerja serta munculnya Unit Kerja baru untuk peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Hal tersebut berdampak terhadap munculnya kegiatan, sasaran dan indikator baru serta penghapusan, penyesuaian dan pergeseran sasaran dan indikator di beberapa kegiatan. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam Matriks pada tabel 3. Adanya perubahan pada matriks seperti tercantum pada tabel 3 memberikan dampak terhadap perubahan matriks pendanaan sebagaimana berikut :

Tabel 8. Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin
 Pada Lampiran I Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target				Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Reali sasi -2020	Target						
			2020	2021	2022	2023					2024				2021	2022	2023
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia										
	SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin						SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin								
	IK.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3	IK.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	78,05	82	83	84	85	Pro PN	Merupakan indikator RPJMN. Target 2021 lebih rendah dari realisasi 2020 karena disesuaikan dengan target pada RKP 2021.	BBPOM di Banjarmasin
	IK.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86	IK.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,54	80	81	82	83	Pro PN		BBPOM di Banjarmasin
	IK.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	85	94	95	95	IK.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	68,77	70	72	74	76	-		BBPOM di Banjarmasin
	IK.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	88	89	IK.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	79,46	85,5	86	86,5	86,7	-		BBPOM di Banjarmasin
	IK.1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-	IK.1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	92	93	94	95	Pro PN		Semula merupakan indikator pada Ditwas Pangan Risiko Rendah dan Sedang (Unit Kerja OTK Lama), dipindahkan ke UPT disesuaikan dengan Unit Organisasi yang melaksanakan sampling dan pengujian pangan fortifikasi

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana				
Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Reali sasi -2020				Target			
			2020	2021	2022	2023	2024								2021	2022	2023	2024
	SK.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin							SK.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin								
	IK.2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	68	71	74	78	81		IK.2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78,36	81	84	86	89	-		BBPOM di Banjarmasin
	SK.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin							SK.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin								
	IK.3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87,5	89	90.5	92		IK.3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,35	91.1	92.3	93.4	94.6	-		BBPOM di Banjarmasin
	IK.3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	72	75	77	80	83		IK.3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76,11	78.33	80.56	82.78	85.01	-		BBPOM di Banjarmasin
	IK.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	88,5	90,55	91	91.5	92		IK.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	89,18	90	91	91,5	92	-		BBPOM di Banjarmasin

Semula							Menjadi							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Reali sasi -2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin							SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin									
	IK.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95		IK.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	81,64	82	83	85	87	-		BBPOM di Banjarmasin	
	IK.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75		IK.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	53,52	60	62	65	70	-		BBPOM di Banjarmasin	
	IK.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	88	86	88	90		IK.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,81	100	100	100	100	-		BBPOM di Banjarmasin	
	IK.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	35	22	23	24		IK.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36,59	45	50	55	60	Pro PN		BBPOM di Banjarmasin	
	IK.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65		IK.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59,96	63	66	68	71	Pro PN		BBPOM di Banjarmasin	
	IK.4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51		IK.4.6	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	3,69	3,91	4,12	4,34	4,55	-		BBPOM di Banjarmasin	

Semula							Menjadi					Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target				Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Reali sasi -2020	Target						
			2020	2021	2022	2023					2024				2021	2022	2023
								IK.4.7	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik		-	77	79	81	Pro PN	Merupakan indikator baru pada UPT untuk peningkatan peran pembinaan UMKM yang selama ini secara umum telah dilakukan oleh UPT namun belum dihitung sebagai kinerja dalam indikator tersendiri	BBPOM di Banjarmasin
	SK.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin						SK.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin								
	IK.5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,73	85,41	78	81	85	IK.5.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,8	90	91,8	93,6	95,5			BBPOM di Banjarmasin
	IK.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	40	60	80	100	IK.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	40	60	80	100	Pro PN		BBPOM di Banjarmasin
	IK.5.3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32	IK.5.3	Jumlah desa pangan aman	4	12	19	25	32	Pro PN		BBPOM di Banjarmasin
	IK.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	2	4	6	8	10	IK.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas (2021-2024)	2	4	6	8	10	Pro PN		BBPOM di Banjarmasin

Semula							Menjadi							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Reali sasi -2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	SK.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin							SK.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin									
	IK.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92		IK.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	97,27	100	100	100	100	Pro PN	BBPOM di Banjarmasin		
	IK.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92		IK.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	96,41	100	100	100	100	Pro PN	BBPOM di Banjarmasin		
	SK.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin							SK.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin									
	IK.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83	85	88	90		IK.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	89,69	90	92	94	96	Pro PN	BBPOM di Banjarmasin		

Semula							Menjadi							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Reali sasi -2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	SK.8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal							SK.8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal									
	IK.8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	85	89	93	94	95		IK.8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	74,08	80.8	83.3	85.8	88.3	-	Penurunan target disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana ada penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%). Selain itu dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Banjarmasin	
	IK.8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	80	84	89	91	92		IK.8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	76,14	78.1	80.1	82.1	84.1	-	Dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan pertahun	BBPOM di Banjarmasin	
	SK.9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal							SK.9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal									
	IK.9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	75	77	80	82	85		IK.9.1	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	80,16	81	82	83	84	-		BBPOM di Banjarmasin	

Semula							Menjadi							Pro PN	Keterangan	Unit Organisasi Pelaksana			
Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Target					Pro gram/ Kegia tan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator		Reali sasi -2020	Target							
			2020	2021	2022	2023	2024					2021	2022				2023	2024	
	SK.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan							SK.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan									
	IK.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	77	78	79	80		IK.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	67,2	73	78	83	88	-		BBPOM di Banjarmasin	
	IK.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3		IK.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	1,82	2	2,25	2,5	3	-		BBPOM di Banjarmasin	
	SK.11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel							SK.11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel									
	IK.11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	93	94	95	96	97		IK.11.1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	90,96	92.5	93.1	94.3	95.5	-	Dilakukan penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun	BBPOM di Banjarmasin	
	IK.11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (90%)	Efisien (92%)	Efisien (93%)	Efisien (94%)	Efisien (95%)		IK.11.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	Efisien (100%)	Efisien (92%)	-	-	-	-	Mulai tahun 2022-2024 target indikator ini dihapus karena sudah terdapat indikator Nilai Kinerja Anggaran	BBPOM di Banjarmasin	

Tabel 9. Matriks Perubahan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin

Pada Lampiran II Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Semula)					Alokasi Anggaran (Menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,4	932,8	1026,09	1128,69	1241,56	695,92	275,08	288,83	303,28	318,44
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	468,86	515,8	567,32	624,05	686,46	381,07	110,51	116,04	121,84	127,93
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	106	116,6	128,26	141,08	155,2	86,99	275,08	288,83	303,28	318,44
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	100,48	110,52	121,57	133,73	147,1	81,66	110,51	116,04	121,84	127,93
	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	-	-	-	-	-	-	110,51	116,04	121,84	127,93
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	84,84	93,32	102,66	112,92	84,84	33,92	137,00	143,85	151,04	158,59
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	107,37	118,1	129,91	142,9	157,19	82,98	134,34	141,06	148,11	155,52
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	85,44	93,98	103,38	113,72	125,09	59,85	86,67	91,00	95,55	100,33
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin	52,72	57,99	63,79	70,17	77,19	19,68	126,82	133,16	139,82	146,81

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran (Semula)					Alokasi Anggaran (Menjadi)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yg diperiksa dan diuji sesuai standar	106	116,6	128,26	141,08	155,2	86,99	630,67	662,20	695,31	730,08
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,48	110,52	121,57	133,73	147,1	81,66	517,91	543,81	571,00	599,55
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	185,77	204,34	224,77	247,25	271,97	529,95	1.012,04	1.062,64	1.115,77	1.171,56
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	472,58	519,84	571,82	629,01	691,9	162,78	374,05	392,75	412,39	433,01
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	1.548,56	1.702,84	1.873,10	2.060,40	2.266,45	1.676,219	231,67	243,25	255,42	268,19
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	442,28	549,05	603,94	664,35	730,79	59,21	527,77	554,16	581,87	610,96
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat & Makanan sesuai standar GLP	9.677,43	1.064,52	1.170,97	1.288,07	1.416,87	1.434,63	28.085,08	33.000,00	14.650,	10.382,5
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	17.242,06	18.966,65	20.863,31	22.949,64	25.244,61	1.648,88	4.044,75	4.246,99	4.459,34	4.682,30
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	12.814,57	14.096,03	15.505,63	17.056,19	18.761,81	12.814,57	618,51	649,44	681,91	716,00
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin	4509,26	4960,19	5456,2	6001,83	6601,99	4.509,26	14.398,28	15.118,19	15.874,10	16.667,81

Keterangan :

- Alokasi Anggaran (Semula) tahun 2020-2024 dan Alokasi Anggaran (Menjadi) tahun 2020-2021 merupakan Total dari Alokasi Anggaran BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. HSU dan Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
- Alokasi Anggaran (Menjadi) tahun 2022-2024 hanya Alokasi Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, karena kedua Loka telah menjadi Satker mandiri.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

- a. Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin dilaksanakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan strategis serta organisasi dan tata kerja BPOM yang berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta proses perencanaan dan penganggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
- b. Berdasarkan hasil reviu terhadap Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin masih berjalan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan untuk mencapai target pada akhir tahun 2024.

2. Rekomendasi


- a. Hasil reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 yang telah dilakukan secara menyeluruh agar dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Balai Besar POM di Banjarmasin serta evaluasi paruh waktu dan akhir tahun pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin.
- b. Selain mengacu pada perubahan lingkungan strategis di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin juga tetap mengacu pada hasil reviu Renstra Badan BPOM.

BAB III
PENUTUP

Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 selain perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaiannya secara berkala, perlu juga dilakukan reviu secara menyeluruh terhadap Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin tersebut. Reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin dilakukan untuk menyeleraskan berbagai perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang berdampak terhadap kinerja BBPOM di Banjarmasin sehingga memerlukan adanya berbagai penyesuaian baik pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator, arah kebijakan, strategi maupun target kinerja.

Untuk memastikan hasil reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin dapat teroperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik, maka penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan Balai Besar POM di Banjarmasin agar memperhatikan hasil reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin. Reviu renstra Balai Besar POM di Banjarmasin harus tetap memperhatikan hasil reviu Renstra Badan BPOM. Melalui reviu Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin ini, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin terus dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi hasil dan berdampak terhadap peningkatan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN


LEONARD DUMA